

dalam al-Qur'an dan hadis untuk menjawab persoalan baru yang muncul kemudian.

Namun demikian, Imam Syafii menyadari tidak semua hukum yang datang kemudian dapat begitu saja dianalogikan kepada hukum asal. Tentu ada beberapa kriteria baku yang dijadikan sebagai standar seorang mujtahid dapat menggunakan metode *qiyās* untuk menetapkan sebuah hukum. Oleh sebab itulah Imam Syafii menyanggah istihsan yang oleh pengikut madzhab Hanafi diakui dan boleh dijadikan sumber hukum Islam.

B. Sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Lahirnya KHI di Indonesia tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bagi orang yang beragama Islam sudah menjadi keharusan untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang tatacara beribadah tetapi juga mengatur hubungan perikatan yang terjadi dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah mu'amalah, diantara hubungan mu'amalah yang sering terjadi dan membutuhkan perhatian khusus adalah bidang hukum keluarga islam, seperti pernikahan, perceraian, perwalian, wasiat, maupun permasalahan warisan.

Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum, pemerintah mengeluarkan PP nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar pulau Jawa dan

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal Hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama hamper dalam setiap persoalan.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para Hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Gagasan untuk membuat suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama direalisasikan dengan pembentukan kompilasi hukum Islam yang dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama RI Nomor 07 /KMA/1985 dan Nomor 25 tahun 1985 pada tanggal 25 maret 1985.

Pelaksanaan proyek pembentukan kompilasi hukum islam dimulai pada tanggal 25 maret 1985, dengan jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkannya SKB. Biaya pelaksanaan berasal dari pemerintah berdasarkan kepres No. 191/SOSROKH/1985 dan No 068/SOSROKH 1985.

Tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum,

1. Hukum Perkawinan
2. Hukum Kewarisan
3. Hukum Perwakafan

Rancangan kompilasi Hukum Islam ini selesai disusun dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap untuk dilokakaryakan, untuk itu pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam melalui yurisprudensi diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.

Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh ketua Mahkamah Agung RI, pelaksanaan pembahasan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam pada lokakarya tersebut dibagi dalam dua instansi yaitu siding pleno dan siding komisi, masing-masing komisi membentuk tim perumus dengan ketentuan sebagai berikut

1. Komisi A tentang hukum perkawinan dengan susunan anggota
 - a. Yahya Hrahap
 - b. Marfuddin Kosasih
 - c. Abdul Halim Muhammad
 - d. Muchtar Zarkasyi
 - e. Ali Yafie.
 - f. Najih Ahyad.
2. Komisi B tentang Hukum Kewarisan susunan anggota
 - a. Wasit Aulawi

- b. Zainan Abidin Abu Bakar
 - c. Azhar Basyir
 - d. Md. Kholid
 - e. Ersyad
3. Komisi C tentang Hukum Wakaf susunan anggota
- a. Masrani Basran
 - b. A. Gani Abdullah
 - c. Rahmat Djatmika
 - d. Ibrahim Husen
 - e. Aziz Masyhuri.

Setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Wakaf mengalami pengahlusan redaksi yang intensif yang dilakukan oleh tim besar, selanjutnya naskah tersebut disampaikan kepada Presiden Oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor : MA/123/1988.prihal Kompilasi Hukum Islam, dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis unhtuk digunakan dalam praktik lingkungan Peradilan Agama Kemudian Lahirlah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.Yang didalam diktumnya mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Untuk melaksanakan intruksi Prersiden tersebut Menteri Agama pada tanggal 22 Juni 1991 mengeluarkan surat keputusan nomor 154 tahun 1991. Yang dalam diktumnya menyatakan beberapa hal diantaranya :

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 untuk dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah dan Masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut.
2. Seluruh Instansi tersebut (dalam dictum pertama) dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya
3. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam bidang tugasnya masing-masing.

Dengan telah dikeluarkannya Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, Kompilasi Hukum Islam telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para Hakim pada lingkungan Peradilan

Pada masa jahiliyah hukum waris didasarkan pada persekutuan dan pertolongan, sehingga seseorang dapat menjadi ahli waris orang lain ketika telah ada sumpah persekutuan atau perjanjian untuk saling menolong. Misalkan A telah melakukan perjanjian persekutuan dengan B, maka B dapat menjadi ahli waris A begitu juga sebaliknya, bila A tidak memiliki ahli waris lain maka seluruh harta bendanya akan diwaris oleh B. ketentuan hukum waris yang telah disebutkan pada permulaan masuknya ajaran islam masih digunakan, hal ini diperkuat dengan riwayat yang mengatakan bahwa abu bakar pernah melakukan sumpah persekutuan dengan seorang laki-laki, setelah laki-laki tersebut meninggal dunia abu bakar mewaris harta peninggalannya.

Ketentuan hukum waris berdasarkan sumpah persekutuan dan perjanjian saling tolong menolong kemudian dirubah dengan ketentuan beragama islam dan hijrah, ketentuan ini memberikan implikasi orang yang seagama (islam) dan melakukan hijrah dari keluarganya berhak menjadi ahli waris walaupun kedudukannya dalam hubungan kekrabatan terhitung jauh dan masih ada kerabat lain yang lebih dekat yang tidak ikut berhijrah, misalkan A berhijrah bersama saudaranya B, A juga memiliki anak laki-laki namun tidak ikut hijrah.

Berdasarkan ketentuan diatas yang berhak menjadi ahli waris A adalah B yang ikut berhijrah, sedangkan anak laki-laki A tidak dapat menjadi ahli waris karena tidak ikut hijrah bersama A. hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al ‘Anfāl ayat 72 yaitu :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَلُوا بِ
 أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ
 أَوْلَىٰ بِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمُجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta danjiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan³².

Ketentuan hukum waris berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat al anfal ayat 72 tersebut diganti dengan ketentuan hukum waris islam berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat al ahzhab ayat 6 yaitu :

التَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ مِنْهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ لِأَن تَقُولُوا لِي أَوْلَىٰ بِمَا كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ³³

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)³⁴.

Dalam surat al ahzhab ayat 6 diatas hukum waris tidak didasarkan atas hijrah tetapi didasarkan atas hubungan sanak saudara, yang meliputi hubungan kekrabatan berdasarkan nasab (keturunan), hubungan kekrabatan berdasarkan

³²al Qur'an, 8: 34. Terjemah Departemen Agama RI, 186.

³³Yahya Bin Abi Al Khair Bin Salim Al 'UmrāNy, Abu Hasan :al Bayān fi al Mazhab al imam asyafi'I, (Jiddah, Dār al Manhaj, t.th), Jild 9., 9.

³⁴al Qur'an, 8: 34. Terjemah Departemen Agama RI, 418.

dilakukan oleh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu 'Aisah RA yang dijelaskan dalam hadist riwayat bukhari :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ تَنبِيءُ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوْاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً فَأَعِينَنِي فِي قَوْلِي إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ لِي أَعَدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَنَهَيْتُ بَرِيرَةَ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرَتْ عَائِشَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُلِيهَا وَاشْتَرِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَقَطَعَتْ عَائِشَةَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَمَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدَ مَا بَالَ رِجَالٌ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرِّ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بِاطِلٍ وَإِنْ كَانَ مَائَةً شَرِطَ قِضَاءُ اللَّهِ أَيْحُ وَشَرِّطَ اللَّهُ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»³⁶

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radiallallahu 'anha berkata: "Bahwa Barirah datang kepadaku seraya berkata: "Tuanku telah menetapkan (tebusan untuk pembebasanku) sebanyak sembilan waq yang setiap tahunnya wajib kubayar satu waq, maka tolonglah aku". Aku berkata: "Jika tuanmu suka, aku akan bayar ketetapan tersebut kepada mereka dan perwalianmu ada padaku. Lalu aku penuhi. Kemudian Barirah datang kepada para sahabat sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk, lalu dia berkata: "Sungguh aku sudah menawarkan hal itu kepada mereka namun mereka enggan menerimanya kecuali bila perwalian tetap menjadi hak mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendengar hal ini lalu 'Aisyah radiallallahu 'anha mengabarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: "Ambillah dia (Barirah) dan berikan syarat perwalian kepada tuannya bahwa perwalian seorang budak adalah bagi yang memerdekakannya". Maka 'Aisyah radiallallahu 'anha melaksanakan perintah Beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah dan mengagungkan-Nya kemudian bersabda: "Bagaimana jadinya suatu kaum, mereka membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada Kitabulloh. Apapun bentuknya syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Allah maka syarat itu batal

³⁶Muhammad bin ismā'il Abu abdillāh al bukhari: *Sohih Al Bukhori*, (Tt, Dār Ṭwq al Najāh, 14 22 H) Jild.3., 192.

sekalipun seratus kali persyaratan. Ketetapan Allah lebih berhaq (untuk ditunaikan) dan syarat (yang ditetapkan) Allah lebih kokoh. Sesungguhnya perwalian (seorang budak) adalah untuk yang memerdekakannya".

3. Sebab-Sebab Hilangnya Hak Menjadi Ahli waris dalam Hukum Islam.

Dalam menentukan jumlah sebab-sebab yang dapat menghilangkan hak seseorang menjadi ahli waris terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan empat, ada juga yang menyebutkan lima, untuk lebih jelasnya akan disebutkan semua dibawah ini :

a. Perbedaan agama (Islam).

Perbedaan agama merupakan salah satu sebab hilangnya hak seseorang untuk menjadi ahli waris, hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Hasan dari Umar bin Ustman dari Usamah bin Zaid dibawah ini :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَبُخَارِيُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَاةَ
بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ³⁷

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim."

³⁷Muslim Bin al hazāj Abuw al Hasan al Qushairy al Naisābury, *al musnad al Sahih al Mukhtashar bi Naql al 'adl 'an al 'adl ilā Rasul Allah Shola Allah 'alaihi salam*, (Bairut, Dār al turath al 'araby, t,th), jild, 3., 1233.

- 2) Kepastian masih hidup atau pernah hidupnya ahli waris walaupun cuma sebentar pada saat pewaris meniggal dunia.
- 3) Diketuahuinya garis kedekatan ahli waris pada pewaris yaitu kekerabatan, pernikahan, maupun memerdekakan budak, melalui pembuktian yang sah menurut hukum.

5. Klasifikasi Ahli Waris.

Ahli waris dalam kajian hukum waris islam dikelompokkan menjadi tiga bagian, pengelompokan terjadi karena tiap-tiap ahli waris memiliki hak yang berbeda dari harta warisan yang ada. Ada yang selalu mendapat bagian pasti dari harta warisan misalkan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan tidak pernah menjadi ahli waris *Ashobah*, ada yang selalu mendapat bagian *Ashabah* (bagian yang didapat dari sisa bagian yang telah ditentukan), ada juga yang mendapatkan bagian pasti pada satu kesempatan sedangkan dalam kesempatan lain mendapat bagian ashobah. diantara pengelompokan tersebut adalah :

- a. Ahli waris yang memiliki bagian pasti (*dhawi al Furūd*)
 - 1) Ibu.
 - 2) Nenek dari ibu.
 - 3) Nenek dari ayah.
 - 4) Sudara laki-laki seibu.
 - 5) Sudara perempuan seibu.
 - 6) Suami.
 - 7) Istri.

b. Ahli waris yang memiliki bagian sisa dari pembagaian yang ada (*dzawil ta'shib*)

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki.
- 3) Sudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-lakinya saudara sekandung.
- 6) Anak laki-lakinya saudara seayah.
- 7) Paman satu kandung dengan ayah.
- 8) Paman satu ayah dengan ayah.
- 9) Anak laki-lakinya paman dari ayah yang sekandung.
- 10) Anak laki-lakinya paman dari ayah yang satu ayah.
- 11) Laki-laki yang memerdekakan budak.
- 12) Perempuan yang memerdekakan budak.

c. Ahli waris yang memiliki dua kemungkinan dalam memperoleh bagian yaitu bagian pasti atau bagaian *Ashabah* (*dhawi al Furūdli wa ta'shib*).

- 1) Anak perempuan.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 3) Saudara perempuan satu kandung.
- 4) Saudara perempuan satu ayah.
- 5) Ayah.

| | | |
|---|--|--|
| Ayah | Bersama anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, bila bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki maka ia mendapat 1/6 plus ashobah | _____ |
| Kakek | Bersama anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, bila bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki maka ia mendapat 1/6 plus ashobah | Ayah |
| Ibu | Bersama anak laki-laki, atau cucu lelaki dari anak laki-laki, atau anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Atau bersama saudara perempuan, saudara laki-laki yang berjumlah lebih dari satu | _____ |
| Nenek (ibunya ibu, atau ibunya ayah) | Tidak bersama ibu, dan atau tidak bersama nenek yang garis keturunannya lebih dekat. | _____ |
| Anak perempuan dari anak laki-laki yang berjumlah satu atau lebih | Bersamaan dengan anak perempuan tunggal, dan atau tidak terdapat ahli waris yang menyebabkannya mendapat ashobah. | Anak laki-laki, dua anak perempuan atau lebih, ketika tidak ada ahli waris ashobah. |
| Saudara perempuan satu ayah berjumlah satu atau lebih | Bersama satu (tunggal) saudara perempuan seayah dan seibu, tidak bersama ahli waris yang mengashobahkannya dan tidak ada penghalang untuk mendapat bagaian. | <i>Bi al Hirmān</i> : anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, dua saudara perempuan sekandung ketika tidak ada yang mengashobahkannya, satu saudara perempuan sekandung ketika menjadi waris <i>Ashabah</i> bersama ahli waris lain. |
| Saudara laki-laki atau saudara | Masing-masing berjumlah tidak lebih dari satu dan tidak ada penghalang | Anak laki-laki, atau cucu laki-laki, ayah |

